

Pengaruh Earnings Management dan Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance Dengan GCG Sebagai Pemoderasi

¹Yunita

¹Prodi Magister Akuntansi, Universitas Trisakti
Alamat email: yunita.29496@gmail.com

²Sihar Tambun

²Prodi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Alamat email: sihar.tambun@gmail.com

Abstract — This research aims to examine how Earnings Management and Financial Derivatives influence Tax Avoidance by using good corporate governance as moderation. The data used is secondary data obtained from financial report data on financial sector companies listed on the IDX from 2016 to 2022. There are 105 companies in the financial sector registered on the IDX. Linear Regression Analysis and Moderated Regression Analysis were used to test this research. The research results show that Earnings Management has a positive effect on tax avoidance. The use of financial derivatives has no effect on tax avoidance. GCG with the proxy of the Independent Board of Commissioners is able to strengthen the influence of Profit Management on Tax Avoidance. GCG as a proxy for Institutional Ownership and the Audit Committee is able to weaken the influence of Earnings Management on Tax Avoidance. GCG with the proxies of the Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership and Audit Committee is unable to moderate the influence of the Use of Financial Derivatives on Tax Avoidance.

Keywords — Corporate Governance, Earnings Management, Financial Derivatives, Institutional Ownership, Tax Avoidance.

1. Pendahuluan

Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU KUP adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh individu atau badan hukum kepada negara yang mengikat secara hukum sedemikian rupa sehingga tidak langsung dikompensasikan dan diperuntukan bagi keperluan negara dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan negara, pajak bagi korporasi bukanlah sumber penghasilan, akan tetapi dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan, karena dengan adanya pajak, pendapatan bersih korporasi dapat berkurang, sehingga korporasi akan melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna mengurangi pembayaran pajak agar lebih efektif.

Cobham, *et. al.*, (2020) *Tax Justice Network* melaporkan Indonesia diperkirakan telah merugikan Rp 68,7 triliun per tahun akibat dari penghindaran pajak. Laporan dari *Tax Justice Network* yang mempunyai *title The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19* mengungkapkan bahwa jumlah ini disebabkan oleh *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh sebagian *company* di Indonesia. Fenomena terakhir adalah hasil laporan LSM *Internasional Global Witness* menduga bahwa PT Adaro Energy telah mengalihkan sebagian keuntungannya dari bisnis batu bara ke Coaltrade Services International (entitas anak Adaro di Singapura). Dengan menjual batubara yang ditambang di Indonesia kepada Coaltrade dengan harga terendah untuk dijual kembali oleh entitas anak tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Global Witness menemukan bahwa antara tahun 2009-2017, lebih dari 70% batubara Coaltrade dibeli dari tambang batubara Adaro di Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa Coaltrade menerima pembayaran pihak ketiga dan afiliasi Adaro lainnya. Komisi penjualan batubara sebelum tahun 2009 diperkirakan sekitar \$4 juta per tahun. Antara 2009 dan 2017, angka itu berubah menjadi \$55 juta per tahun. Coaltrade juga menggunakan peluang keuntungan ini dan menyimpannya di Singapura, yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah daripada yang dimiliki Indonesia.

Tax Avoidance adalah hambatan dalam pemungutan pajak yang menyebabkan turunnya pendapatan pemerintah. *Tax Avoidance* tidak dilarang karena memanfaatkan celah peraturan yang ada serta menggunakan metode yang diizinkan oleh undang-undang. *Earnings Management* mempengaruhi biaya pajak yang dibayar. Manajer melakukannya dengan mengurangi laba perusahaan untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar (Septiadi *et al.*,

2017). Rosdiani dan Hidayat (2020) berpendapat bahwa derivatif keuangan adalah salah satu faktor penentu penghindaran pajak. Pasalnya, aturan perpajakan untuk perdagangan derivatif masih lemah dan kerap kontroversial. Perusahaan juga dapat memanfaatkan ketidakjelasan aturan perpajakan atas transaksi derivatif untuk menghindari pajak. Derivatif keuangan adalah perjanjian, juga dikenal sebagai kontrak, diantara dua (dua) pihak maupun lebih guna membeli maupun menjual aset atau komoditas yang akan digunakan sebagai objek perdagangan pada suatu waktu dan dengan harga sesuai kesepakatan. Penggunaan derivatif biasanya membantu entitas dalam rangka menghindari risiko yang terkait dengan nilai tukar mata uang, suku bunga serta harga komoditas. *Tax Avoidance* digunakan dengan cara memanfaatkan *loopholes* pada aturan pajak yang ada. Mekanisme *corporate governance* mampu meningkatkan pengendalian yang maksimal karena dipercaya dapat mengendalikan secara efektif mengenai keputusan yang dibuat oleh manajemen.

Perusahaan yang memiliki *Good Corporate Governance* cenderung membuat kebijakan pajak yang tidak berisiko dan lebih taat terhadap aturan pajak yang ada (Tahar & Rachmawati, 2020). Pada penelitian ini mekanisme *Good Corporate Governance* yang akan digunakan adalah Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional. Komisaris Independen dapat terdiri dari anggota yang tidak memiliki hubungan istimewa, biasa disebut anggota independen dan anggota terafiliasi. Komite independen merupakan mekanisme pengawasan yang memberikan arahan dan petunjuk kepada manajemen serta mencegah pengambilan keputusan yang merugikan. Komite Audit mampu melakukan pengawasan dalam penyusunan pajak dan mengawasi perusahaan dalam melaporkan laba sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga, yaitu lembaga keuangan, pemerintah, lembaga asing, badan usaha, perwalian dll. Kehadiran kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan mampu meningkatkan pengawasan untuk mengoptimalkan kinerja operasional, karena kepemilikan saham menjadi sumber kekuatan yang mampu mendorong kinerja operasional perusahaan.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Good Corporate Governance* dengan mekanisme Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit yang mampu memoderasi pengaruh *Earnings Management* dan Penggunaan Derivatif Keuangan terhadap *Tax Avoidance*. Jadi, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya karena menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi dimana penelitian yang membahas *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi relatif sedikit. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Diharapkan dapat membantu meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan referensi bukti empiris tentang upaya perusahaan untuk menghindari pajak yang ada, termasuk manajemen laba dan penggunaan derivatif keuangan yang dimoderasi oleh mekanisme *Good Corporate Governance* yaitu Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit.

2. Kontribusi Praktis

Diharapkan agar menjadi bahan alternatif dalam upaya pengambilan keputusan untuk kegiatan perencanaan pajak yang akan dilakukan agar tidak melanggar aturan pajak.

3. Kontribusi Kebijakan

Bagi fiskus diharapkan dapat memperkuat peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak memiliki celah untuk dimanfaatkan dalam melakukan *Tax Avoidance*. Agar penerimaan pajak negara dapat dimaksimalkan. Bagi Pemerintah/Regulator penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada pemerintah (regulator) terkait dengan aturan pajak, agar praktik penghindaran pajak dapat diminimalisasi. Kemudian, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pemerintah agar dapat mengawasi dengan ketat jenis-jenis cara yang bisa mengurangi adanya ketidaksinambungan antara target pajak dengan pencapaian yang didapatkan.

2. Review LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori agensi didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) Sebagai suatu hubungan keagenan dalam suatu kontrak, dimana satu orang atau lebih (principal) meminta orang lain (agent) untuk melakukan beberapa tugas atas nama principal. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak demi kepentingan mereka sendiri untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Pemilik hanya tertarik pada hasil investasinya di perusahaan, sedangkan manajer

menginginkan kepuasan kerja dalam bentuk imbalan uang dan bonus. Manajer mencari keuntungan sendiri dan menggunakan ketentuan untuk menyajikan kinerja sesuai dengan kepentingan manajemen yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan pemilik, yaitu *Earnings Management*. *Tax Avoidance* merupakan konflik antar lembaga dan hubungan ini dapat dijelaskan dari perspektif saat ini, yang memiliki dua tujuan. Pertama, penghindaran pajak bukan hanya penyembunyian pendapatan oleh otoritas pajak, tetapi juga penyembunyian aktivitas terselubung yang dapat merugikan pemilik atau pemegang saham. (Septiadi *et al.*, 2017). *Good Corporate Governance* sebagai mekanisme yang efektif untuk meminimalkan konflik keagenan. *Good Corporate Governance* juga menyediakan struktur yang memfasilitasi penetapan tujuan organisasi dan cara menentukan metode untuk memantau kinerja di dalam sebuah perusahaan.

Teori Portfolio

Diperkenalkan oleh Markowitz pada tahun 1952. Markowitz (1952) dalam Hartono (2014:4) mengasumsikan bahwa investor membuat keputusan investasi berdasarkan keuntungan (*return expectation*) dan resiko portofolio (*risk portfolio*). Teori portofolio berkaitan dengan persepsi investor tentang risiko dan imbalan, yang diukur secara statistik untuk membentuk portofolio investasi mereka. Transaksi derivatif, seperti opsi dan future, dapat digunakan sebagai alat diversifikasi yang membantu dalam mengurangi risiko portofolio. Dalam konteks transaksi derivatif, investor dapat menggunakan instrumen Optimasi Return dan Risiko untuk meningkatkan return atau mengurangi risiko portofolio. Misalnya, dengan membeli opsi put, investor dapat memperoleh hak untuk menjual aset pada harga tertentu, yang dapat membantu dalam mengurangi risiko peningkatan harga aset tertentu. Dengan demikian, teori portofolio Markowitz memberikan kerangka pemahaman yang penting dalam memahami bagaimana transaksi derivatif dapat digunakan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan return investasi, serta bagaimana analisis statistik dapat digunakan untuk menilai kinerja instrument tersebut.

Tax Avoidance

Stiglitz (1985) mengemukakan 3 (tiga) prinsip dasar penghindaran pajak dalam pajak penghasilan, yaitu:

1. Penundaan nilai beban pajak sebenarnya sehingga pajak yang saat ini dibayarkan jauh lebih sedikit.
2. Memanfaatkan celah hukum pajak lintas entitas perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang berbeda. Ini adalah metode yang sangat efektif untuk mengurangi kewajiban pajak dalam perusahaan afiliasi.
3. Memanfaatkan celah hukum pajak atas keuntungan aset jangka panjang yang dikenakan pajak pada tingkat yang lebih rendah daripada bentuk lain. Ini memberikan dorongan untuk "mengubah" pengembalian menjadi keuntungan jangka panjang.

Meskipun tidak ada undang-undang yang secara umum dilanggar, semua pihak setuju bahwa penghindaran pajak secara praktis tidak dapat diterima. Hal ini karena penghindaran pajak berdampak langsung pada pengikisan basis pajak, mengurangi jumlah penerimaan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Earnings Management

Tujuan dari manajemen laba Menurut Scout (2003) adalah : *Bonus Purposes* (Tujuan Bonus), *Motivation* (Motivasi Perpajakan), Pergantian CEO, *Initial Public Offering* (IPO). Pola Earnings Management: *Taking A Bath* (Membuang aset tertentu dan menghitung perkiraan biaya masa depan dari laporan saat ini), *Clear the Desk* (Menyembunyikan bukti, sehingga laba yang dilaporkan tinggi), *Income Minimization*, *Income Maximization*, *Income Smoothing*. Tindakan *Earnings Management* ini dapat menghasilkan pengakuan kinerja yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam satu periode keuangan daripada yang lain karena manajer berusaha mencapai tujuannya. Ramadhania *et al.*, (2019) menyatakan bahwa organisasi cenderung menerapkan *Earnings Management* melalui strategi *income minimization*. Artinya, semakin rendah keuntungan perusahaan maka semakin rendah pula beban pajak perusahaan. Strategi ini mengurangi intensitas penghindaran pajak perusahaan, karena beban pajak sudah lebih rendah dari sebelumnya. Akibatnya, manajer berusaha melaporkan laba dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang dapat mengurangi laba (minimalisasi pendapatan) dan hal ini berdampak pada praktik penghindaran pajak.

Derivatif Keuangan

Derivatif adalah kontrak keuangan antara dua (dua) pihak atau lebih yang bertujuan untuk memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset/barang yang digunakan untuk tujuan komersial pada waktu dan harga yang sama yang disepakati antara penjual dan pembeli. Instrumen derivatif keuangan adalah instrumen derivatif yang variabel dasarnya adalah instrumen keuangan, dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya (www.idx.co.id). Meskipun akuntansi untuk instrumen derivatif didasarkan pada instrumen pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), terdapat pengecualian ketika instrumen derivatif digunakan untuk lindung nilai. Instrumen derivatif dirancang untuk cakupan kebutuhan dan cakupan yang efektif, pemrosesan dilakukan sesuai aturan akuntansi lindung nilai (*hedge accounting*).

Menurut Oktavia dan Martani (2013) Aturan perpajakan di Indonesia masih sangat lemah dan sering diperdebatkan. Misalnya, apakah kerugian derivatif yang timbul untuk tujuan spekulatif dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak? Jika perdagangan derivatif bukan untuk tujuan lindung nilai, kerugian atas perdagangan derivatif tidak boleh diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan, terutama jika perdagangan derivatif tidak memiliki aset dasar. Namun, peraturan perpajakan Indonesia tidak membedakan antara derivatif keuangan lindung nilai dan derivatif keuangan spekulatif. Faktanya, menentukan apakah kerugian derivatif dapat dikurangkan atau tidak membutuhkan definisi yang jelas apakah transaksi derivatif bersifat spekulatif atau tidak.

Good Corporate Governance

Pada penelitian ini mekanisme *Good Corporate Governance* yang akan digunakan adalah Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional:

1. Dewan Komisaris Independen

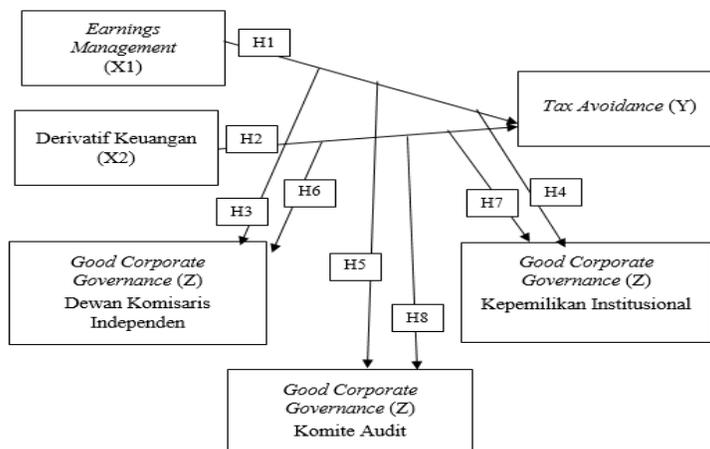
Dalam penelitian ini, proporsi Dewan Komisaris Independen digunakan untuk mengukur *Good Corporate Governance* dikarenakan, jika seorang dewan komisaris tidak terafiliasi maka semakin baik dewan komisaris tersebut untuk melakukan pengawasan sehingga tindakan manipulasi laporan keuangan seperti *Earnings Management* dan Penggunaan Derivatif Keuangan dalam rangka penghindaran pembayaran pajak akan menurun.

2. Kepemilikan Institusional

Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen. Seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

3. Komite Audit

Komite Audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, Komite Audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya seperti *Tax Avoidance*.



Gambar 1. Kerangka Model Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Earnings Management terhadap Tax Avoidance

Salah satu motivasi manajemen laba perusahaan adalah penghindaran pajak, yang didasarkan pada insentif manajemen untuk melakukan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Karena motivasi untuk mengurangi beban pajak, manajemen perusahaan menggunakan berbagai cara untuk mengurangi laba. *Earnings Management* perusahaan mempengaruhi sejauh mana hal itu mempengaruhi *Tax Avoidance*. Laba yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif perusahaan. Namun peningkatan laba tentunya akan berdampak pada peningkatan beban pajak perusahaan. Hal inilah yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba sekaligus agresivitas pajak agar dapat memenuhi ekspektasi para pemegang saham, yaitu laba tinggi dan beban pajak rendah untuk meningkatkan penerimaan bersih perusahaan (Firmansyah *et. al.*, 2022). Manajemen laba meningkatkan laba akrual yang berdampak pada tingginya penghasilan kena pajak serta hutang pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk menurunkan beban pajak agar dua tujuan utama perusahaan, yaitu menghasilkan laba akrual dan aliran kas bersih yang tinggi, dapat tercapai (Nurfitriasis & Istiqomah, 2022). H₁: *Earnings Management* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Penggunaan Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance

Oktavia & Martani, (2021) mengemukakan bahwa Perusahaan dapat memanfaatkan definisi spekulatif perdagangan derivatif yang tidak jelas untuk menggunakan derivatif keuangan sebagai sarana penghindaran pajak. Dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a dalam UU PPh telah disebutkan bahwa:” Biaya yang akan diakui sebagai beban harus berkaitan langsung atau tidak langsung dengan usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan kena pajak”. Padahal, untuk menentukan apakah kerugian derivatif dapat dikurangkan, perlu ada definisi yang jelas dalam peraturan perpajakan apakah transaksi derivatif bersifat spekulatif. Peraturan perpajakan yang tidak jelas mengenai transaksi derivatif dapat digunakan oleh entitas untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, tingkat *Tax Avoidance* pada entitas yang menggunakan *Financial Derivatif* lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. H₂: Penggunaan Derivatif Keuangan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Earnings Management terhadap Tax Avoidance dengan Mekanisme Good Corporate Governance (Dewan Komisaris Independen) sebagai Variabel Moderasi

Dewan komisaris dalam komisaris independen bekerja guna menjadi pengawas dalam penyusunan *Financial Statement* dalam sebuah entitas. Dengan demikian, tingginya proporsi Dewan Komisaris Independen dalam sebuah perusahaan akan mengurangi praktik *Earnings Management* dalam hal penghindaran pajak. Karena, suatu perusahaan yang menerapkan prinsip mekanisme *Good Corporate Governance* telah memahami betul aspek-aspek yang ada pada perusahaan seperti *transparency, accountability, responsibly, independency dan fairness*. Dengan menerapkan aspek-aspek tersebut diharapkan manajemen akan mengurangi praktik *Earnings Management* dalam rangka untuk penghindaran pajak. H₃: Dewan Komisaris Independen dapat memperlemah pengaruh *Earnings Management* terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Earnings Management terhadap Tax Avoidance dengan Mekanisme Good Corporate Governance (Kepemilikan Institusional) sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan menurunkan praktik penghindaran pajak (Krisna, 2019). Sedangkan menurut Pratomo & Rana (2021) Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti didalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan penghindaran pajak. Jadi, semakin tinggi kepemilikan institusional suatu entitas maka akan mengurangi manajemen laba yang dilakukan perusahaan sebagai bagian dari penghindaran pajak. H₄: Kepemilikan Institutional dapat memperlemah pengaruh *Earnings Management* terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Earnings Management terhadap Tax Avoidance dengan Mekanisme Good Corporate Governance (Komite Audit) sebagai Variabel Moderasi

Komite Audit memiliki tugas untuk melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektifitas agar terciptanya pelaporan keuangan yang transparansi, berkualitas, dan pengungkapan informasi dari manajemen yang adil bagi stakeholder. Sehingga, semakin meningkat total anggota Komite Audit dipercaya mampu menjaga agar entitas taat kepada *Good Corporate Governance*, untuk mencegah terjadinya manajemen laba dalam rangka penghindaran pajak. H₅: Komite Audit dapat memperlemah pengaruh *Earnings Management* terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Penggunaan Derivatif Keuangan terhadap Tax Avoidance dengan Mekanisme Good Corporate Governance (Dewan Komisaris Independen) sebagai variable Moderasi

Anggota DKI (Dewan Komisaris Independen) mampu menjalankan pengawasan guna memberikan dukungan terhadap *Good Corporate Governance* dan membuat pelaporan keuangan dapat diandalkan dan lebih obyektif. Sehingga, semakin banyaknya proporsi dewan komisaris didalam sebuah perusahaan, semakin kecil kemungkinan sebuah perusahaan akan dapat memanfaatkan ketidakjelasan aturan perpajakan atas transaksi derivatif untuk menghindari pajak. H₆: Dewan Komisaris Independen dapat memperlemah pengaruh Penggunaan Derivatif Keuangan terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Penggunaan Derivatif Keuangan terhadap Tax Avoidance dengan Mekanisme Good Corporate Governance (Kepemilikan Institusional) sebagai variable Moderasi

Kepemilikan institusional memiliki implikasi penting dalam pengawasan manajemen karena memudahkan pemantauan operasional perusahaan secara lebih maksimal. Tingginya tingkat kepemilikan oleh investor institusi menyebabkan peningkatan upaya pengawasan oleh investor institusi untuk mencegah tindakan manajemen yang mengutamakan kepentingan pribadi dan kemudian berdampak negatif pada pemilik perusahaan. Hal ini berarti kepemilikan institusional yang tinggi mampu mengawasi manajemen untuk melakukan pengungkapan sesuai dengan peraturan pemerintah, namun dalam hal ini peraturan mengenai penggunaan transaksi derivatif masih lemah dan menghindari pembayaran pajak. H₇: Kepemilikan Institusional dapat memperlemah pengaruh Penggunaan Derivatif Keuangan terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Penggunaan Derivatif Keuangan terhadap Tax Avoidance dengan Mekanisme Good Corporate Governance (Komite Audit) sebagai variable Moderasi

Komite audit mempunyai keahlian akuntansi atau keuangan dan berperan penting dalam penerapan GCG. Semakin tinggi jumlah komite audit internal, semakin tinggi pula tingkat pengawasannya. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan (Fahmi *et al.*, 2022). Keberadaan komite audit sangat penting dalam upaya penghindaran pajak karena komite audit berperan mengevaluasi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen secara keseluruhan. Semakin banyak komite audit yang dimiliki suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinannya untuk menggunakan derivatif sebagai bagian dari penghindaran pajak. H₈: Komite Audit dapat memperlemah pengaruh Penggunaan Derivatif Keuangan terhadap *Tax Avoidance*.

3. Metode Penelitian

Pengujian hipotesis digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Studi ini menggunakan penelitian kausal, yang berarti satu atau lebih variabel dianggap sebagai variabel bebas dan dibandingkan dengan variabel lain yang disebut variabel terikat. Karena jenis data yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, atau mengkuantifikasi data (Sugiyono, 2017). Pengujian ini dilakukan menggunakan Software Stata15, dan informasi yang digunakan berasal dari Laporan Keuangan perusahaan sektor *Financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data penelitian ini mencakup perusahaan di sektor

Financials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016 hingga 2022. Untuk memilih sampel, kriteria yang digunakan adalah :

- Ketersediaan laporan keuangan selama 7 (tujuh) periode pada perusahaan sektor Financials di Indonesia.
- Ketersediaan data terkait pengukuran masing-masing variable pada setiap perusahaan sektor Financials.
- Perusahaan sektor Financials yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Dependen (Y) <i>Tax Avoidance</i> (Dyreg, <i>et. al.</i> , 2010)	CETR = $\frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Independen (X1) <i>Earnings Management</i> (Dechow <i>et al.</i> 1995)	$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$	Rasio
Independen (X2) Penggunaan Derivatif Keuangan (Sundari & Nofryanti, 2019)	$DER = \frac{\text{Nilai Absolut fair value of derivative instrumen}}{\text{Total Asset Tahun } t - 1}$	Rasio
Moderasi (M) <i>Good Corporate Governance</i> (Syofyan, 2021)	1. Dewan Komisaris Independen $DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}}$ 2. Kepemilikan Institusional $KI = \frac{\text{Proporsi Saham Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Diterbitkan}}$ 3. Komite Audit Komite Audit = LN (Jumlah Komite Audit)	Rasio

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Estimasi Model Regresi Data Panel dengan tiga teknik pendekatan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Kemudian melakukan Pemilihan Model Estimasi melalui Uji Chow, Hausman dan LM. Dan berikut ini adalah model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis:

$$TA = \alpha + \beta_1 EM + \beta_2 DER + \beta_3 EM * DKI + \beta_4 EM * KI + \beta_5 EM * KA + \beta_6 DER * DKI + \beta_7 DER * KI + \beta_8 DER * KA + e$$

Keterangan :

- α : Konstanta
 $\beta_1 - \beta_8$: Koefisien Regresi
 TA : *Tax Avoidance*
 EM : *Earnings Management*
 DER : Derivatif Keuangan

DKI : Dewan Komisaris Independen
KI : Kepemilikan Institusional
KA : Komite Audit
e : Error

4. Hasil Dan Pembahasan

Berikut tabel hasil analisis statistic deskriptif yang telah diperoleh:

Variabel	Mean	Std. Dev	Min	Max	Obsv.
TA Overall	0.2431	0.0592	0.0024	0.4731	N=105
EM Overall	-0.0010	0.2140	-0.8677	0.9393	N=105
DER Overall	0.0003	0.0011	-0.0029	0.0057	N=105
DKI Overall	0.5493	0.0955	0.2857	0.8333	N=105
KI Overall	0.7535	0.2055	0.1098	1	N=105
KA Overall	1.3402	0.2791	1.0986	1.9459	N=105

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis statistik deskriptif adalah:

1. *Tax Avoidance* diukur dengan variabel cash effective tax rate (CETR). mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 0.2431 yang berarti bahwa rata-rata perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini melakukan penghindaran pajak sebesar 24.31 %. Hal ini menunjukkan masih banyak entitas melakukan *Tax Avoidance* dikarenakan, pajak adalah biaya yang harus dibayarkan. Nilai terendah (minimum) sebesar 0.0024, hal ini menunjukkan bahwa perbandingan antara biaya tax dengan laba sebelum pajak sebesar 0.24%. Sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 0.4731 hal ini menunjukkan bahwa antara beban pajak dengan laba sebelum pajak sebesar 47.31%. Standar deviasi untuk CETR adalah 0.0592. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data dari variabel *Tax Avoidance* memiliki varian atau sebaran yang kecil. Sehingga dapat dikatakan data yang digunakan merupakan data yang baik.
2. *Earnings Management* diukur dengan variabel Discretionary Accrual (DA). Variabel manajemen laba mempunyai nilai minimum sebesar -0.8677 yang dimiliki oleh Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) pada tahun 2018, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan angka laba. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0.9393 yang dimiliki oleh Bank BTPN Tbk. (BTPN) pada tahun 2019, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan angka laba. Nilai rata-rata (mean) variabel manajemen laba sebesar -0.0010, hal ini berarti bahwa *average* perusahaan terindikasi melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan angka laba. Standar deviasi sebesar 0.2140. Karena nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data dari variabel *Earnings Management* memiliki sebaran data yang tidak baik.
3. *Financial Derivatif* diukur dengan *Net Fair Value of Derivatif Instrument* (FVDER). Nilai rata-rata adalah 0.0003 artinya liabilitas derivatif lebih besar dibanding aset derivatif sebesar 0.03% dari total aset 1 tahun sebelumnya. Nilai FVDER terbesar adalah 0.0057 yang dimiliki oleh Bank Multiarta Sentosa Tbk. (MASB) pada tahun 2022 mengartikan aset derivatif lebih besar dibanding liabilitas derivatif sebesar 0.57% dari total aset tahun 2021. Sementara itu, nilai terkecil variabel derivatif keuangan sebesar -0.0029 dimiliki oleh Buana Finance Tbk. (BBLD) pada tahun 2019, mengartikan bahwa penggunaan liabilitas derivatif lebih besar 0.29% dari total aset tahun 2018 dibanding aset derivatif. Selanjutnya, standar deviasi variabel derivatif keuangan pada data adalah 0.0011, lebih besar dari rata-rata atau mean derivatif keuangan. Dapat disimpulkan bahwa derivatif keuangan maksimum dan derivatif keuangan minimum cukup berbeda.
4. Dewan Komisaris Independen mempunyai nilai minimal yaitu 0.2857 pada Bank Mega Tbk. (MEGA) tahun 2017, sedangkan nilai maksimum sebesar 0.8333 pada Bank Negara Indonesia (BBNI) tahun 2019. Nilai rata rata sebesar 0.5493 dan standar deviasi sebesar 0.0955. Dari hasil uji statistik menghitung besaran nilai rata-rata Dewan Komisaris Independen yang mendekati nilai maksimal pada data sampel maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata

perusahaan yang menjadi sampel memiliki Dewan Komisaris Independen yang berperan penting dalam menjalankan perusahaan. Sedangkan nilai rata-rata Dewan Komisaris Independen juga menunjukkan lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi hal ini dapat di artikan sebagai nilai DKI memiliki penyebaran data yang kurang bervariasi.

5. Variabel Kepemilikan Institusional diukur dengan rasio saham institusi dibagi dengan saham yang beredar, dengan jumlah data sebanyak 105 (N) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.7535 dengan nilai minimum sebesar 0.1098 dan nilai maximum sebesar 1 sedangkan standar deviasinya 0.2055. Hal ini menunjukkan bahwa 75.35% perusahaan sampel terdapat saham institusional, dengan adanya Kepemilikan Institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.
6. Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan tata kelola perusahaan dan audit eksternal atas laporan keuangan. Pengukuran Komite Audit menggunakan LN dari jumlah Komite Audit setiap satu tahun kerja pada perusahaan. Berdasarkan tabel, variabel Komite Audit memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1.3402 dan standar deviasi sebesar 0.2791 yang artinya data dalam penelitian ini mempunyai sebaran kecil dikarenakan standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), karena tidak terdapat kesenjangan yang cukup besar dari nilai Komite Audit antara nilai minimum dan nilai maksimumnya sehingga dapat dikatakan data Komite Audit cukup baik. Berdasarkan tabel, nilai minimum variabel Komite Audit sebesar 1.0986. Sedangkan, nilai maksimum variabel Komite Audit sebesar 1.9459.

Estimasi Model Regresi Data Panel

Hasil analisis regresi menggunakan tiga teknik pendekatan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Random Effect Model* (REM), dan *Fixed Effect Model* (FEM) adalah berikut ini:

Hasil Uji Analisis *Common Effect Model* (CEM) adalah sebagai berikut:

Number of obs	=	105
F (8, 96)	=	2.50
Prob > F	=	0.0165
R-squared	=	0.1723
Adj R-squared	=	0.1034
Root MSE	=	.05613

Hasil Uji Analisis *Fixed Effect Model* (FEM) adalah sebagai berikut:

Fixed Effects (within) regression:		
	Prob>chi2 =	0.2858

Hasil Uji REM adalah:

	rho	=	0.3241	(Fraction of variance due to u_i)
Xttest0:				
		Prob>chi2 =	0.0007	

Pemilihan Model Terbaik

Uji Chow

Nilai rho pada Fixed Effect Model digunakan untuk menentukan kualitasnya, nilai $\rho > 0.5$ menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model*. Dan jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka *Common Effect Model* lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rho pada *Fixed Effect Model* adalah 0.2858 dimana lebih besar dari 0.05. Maka model *Fixed Effect Model* Lebih Baik daripada model *Common Effect*.

Uji Hausman

Jika nilai $\text{prob} > \chi^2$ lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, maka model *Fixed Effect* lebih baik. Jika sebaliknya, maka *Random Effect* lebih baik.

Hausman Fixed Random:		
Prob>chi2	=	0.9964

Hasilnya adalah nilai $\text{Prob} > \chi^2 = 0.9964$ dimana lebih besar dari 0.05 yang berarti *Random Effect Model* lebih baik daripada *Fixed Effect*.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Kriteria uji LM adalah bahwa jika nilai $\text{prob} > \chi^2$ lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, maka *Random Effect Model* lebih baik. Jika yang terjadi sebaliknya maka *Common Effect Model* lebih baik. Hasilnya adalah nilai $\text{prob} > \chi^2 = 0.0007$ yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, maka *Random Effect Model* lebih baik.

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini tidak ada Uji Asumsi karena model yang terpilih adalah REM/*Random Effect Model* (Septianingsih, 2022). Hal ini disebabkan oleh karakteristik REM yang mengasumsikan bahwa variabel acak yang digunakan dalam model tersebut sudah cukup untuk menangani masalah heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

Uji Adjusted R2

Number of obs	=	105
F (8, 96)	=	2.50
Prob > F	=	0.0165
R-squared	=	0.1723
Adj R-squared	=	0.1034
Root MSE	=	.05613

Nilai adjusted R-squared yaitu 0.1034 atau sebesar 10.34%. Nilai koefisien determinasi itu berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari *Earnings Management* dan *Financial Derivatif* mampu menjelaskan variabel *Tax Avoidance* pada sektor *Financials* yang terdaftar di BEI sebesar 10.34%, sedangkan sisa dari itu sebanyak 89.66% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain.

Uji F

Number of obs	=	105
F (8, 96)	=	2.50
Prob > F	=	0.0165
R-squared	=	0.1723
Adj R-squared	=	0.1034
Root MSE	=	.05613

Nilai signifikansi $0.0165 < 0.05$, maka artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel EM dan DER yang dimoderasi oleh GCG berpengaruh terhadap TA.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

TA	Coef.	Std. Err.	t	P>[t]
Cons.	0.2452	0.0059	41.39	0.000
EM	0.5092	0.2937	1.73	0.086
DER	-87.49025	2.5697	-1.66	0.099
EMDKI	0.7572	0.3421	2.21	0.029
EMKI	-0.6241	0.1994	-3.13	0.002
EMKA	-0.3675	0.1638	-2.24	0.027
DERDKI	104.6393	54.4790	1.92	0.058
DERKI	-3.8260	39.1765	-0.10	0.922
DERKA	23.9183	24.5530	0.97	0.332

Uji Regresi

TA	Coef.	Std. Err.	z	P>[z]	Hasil
Cons.	0.2441	0.0092	26.52	0.000	
EM	0.4396	0.1447	3.04	0.002**	H1 Diterima
DER	-87.15345	3.2703	-1.64	0.102	H2 Ditolak
EMDKI	0.6843	0.2802	2.44	0.015*	H3 Ditolak
EMKI	-0.5610	0.0782	-7.17	0.000***	H4 Diterima
EMKA	-0.3228	0.0914	-3.53	0.000***	H5 Diterima
DERDKI	87.2280	55.3648	1.58	0.115	H6 Ditolak
DERKI	-12.4020	28.2171	-0.44	0.660	H7 Ditolak
DERKA	38.47382	7.7144	1.39	0.165	H8 Ditolak

Sig: *10%, **5%, ***1%

Pemilihan model regresi menggunakan model terbaik yaitu *Random Effect Model* dengan tambahan *syntax robust* untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas. Hasil analisa dari tabel uji regresi diatas adalah: Persamaan uji regresi (MRA) dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1EM + \beta_2DER + \beta_3EM*DKI + \beta_4EM*KI + \beta_5EM*KA + \beta_6DER*DKI + \beta_7DER*KI + \beta_8DER*KA + e$$

$$TA = \alpha .2441093 + EM .4396766 + DER -87.15347 + EM*DKI .6843905 + EM*KI -.561074 + EM*KA -.3228733 + DER*DKI 87.22805 + DER*KI -12.40206 + DER*KA 38.47389 + e$$

Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai Konstanta sebesar 0.2441 menunjukkan ketika *Earnings Management* dan *Financial Derivatif* bernilai 0, maka *Tax Avoidance* akan bernilai 0.2441.

2. Koefisien regresi *Earnings Management* sebesar 0.4396 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat maka akan terjadi peningkatan aktivitas *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan sebesar 0.4396 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini dan terdapat hubungan searah (positif).
3. Koefisien regresi *Financial Derivatif* sebesar -87.1534 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat maka akan terjadi peningkatan aktivitas *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan sebesar -87.1534 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini dan terdapat hubungan searah (negatif).
4. Koefisien regresi interaksi *Earnings Management* dan Dewan Komisaris Independen sebesar 0.6843 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar 0.6843. Artinya terdapat hubungan searah (positif).
5. Koefisien regresi interaksi *Earnings Management* dan Kepemilikan Institusional sebesar -0.5610 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar -0.5610. Artinya terdapat hubungan searah (negatif).
6. Koefisien regresi interaksi *Earnings Management* dan Komite Audit sebesar -0.3228 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar -0.3228. Artinya terdapat hubungan searah (negatif).
7. Koefisien regresi interaksi *Financial Derivatif* dan Dewan Komisaris Independen sebesar 87.22805 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar 87.22805. Artinya terdapat hubungan searah (positif).
8. Koefisien regresi interaksi *Financial Derivatif* dan Kepemilikan Institusional sebesar -12.4020 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar -12.4020. Artinya terdapat hubungan searah (negatif). Koefisien regresi interaksi *Financial Derivatif* dan Komite Audit sebesar 38.47389 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat maka akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar 38.47389. Artinya terdapat hubungan searah (positif).

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh *Earnings Management* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji regresi memperoleh nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ yang berarti H1 diterima dan *Earnings Management* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Jadi, semakin besar sebuah entitas melakukan *Earnings Management*, semakin mengindikasikan bahwa entitas tersebut melakukan penghindaran pajak. Nilai rata-rata (mean) variabel manajemen laba sebesar -0.0010, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan terindikasi melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan angka laba sebagai upaya melakukan penghematan pembayaran pajak. Pengaruh teori agensi dengan manajemen laba yaitu pemegang saham memberikan wewenang kepada manajer perusahaan untuk dapat menghasilkan laba besar. Akan tetapi manajer perusahaan memiliki informasi terkait laba sehingga mendorong manajer melakukan penghematan pembayaran pajak dengan melakukan manajemen laba. Hasil penelitian dari *Earnings Management* menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, maka perusahaan-perusahaan sektor *Financials* yang terdaftar di BEI menggunakan manajemen laba sebagai sarana penghindaran pajak dengan cara menurunkan laba yang dimiliki perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan tersebut menjadi lebih minimal dari sebenarnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurfitriyah & Istiqomah (2022), Marfiana & Putra (2021), yang menyatakan bahwa *Earnings Management* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ramadhan *et. al.*, (2021) yang menyatakan bahwa penelitian tersebut negatif dan tidak sejalan dengan penelitian Nadhifah & Arif (2020) yang menyatakan bahwa *Earnings Management* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Financial Derivatif* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji regresi yang sudah dilakukan diperoleh hasil nilai signifikansi $0.102 > 0.05$ yang berarti bahwa *Financial Derivatif* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu H2 ditolak, yang berarti derivatif keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan derivatif keuangan oleh entitas tidak serta merta mengarah pada penghindaran pajak. Dalam konteks ini, perusahaan

sekor *Financials* yang menjadi sampel, baik nilai derivatifnya di atas atau di bawah rata-rata, tidak melakukan penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa derivatif keuangan tidak berdampak pada penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Derivatif Keuangan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* didukung oleh penelitian Ridiana (2021) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya cukup bukti bahwa derivatif keuangan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Earnings Management terhadap Tax Avoidance dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji regresi yang sudah dilakukan diperoleh hasil nilai signifikansi $0.015 < 0.05$ yang berarti bahwa Dewan Komisaris Independen mampu memperkuat pengaruh *Earnings Management* terhadap *Tax Avoidance*. Akan tetapi, H3 ditolak pada penelitian ini karena koefisien positif (memperkuat), sedangkan hypothesis penelitian adalah negative (memperlemah). Dengan koefisien positif tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris Independen mampu mempengaruhi manajemen laba sebuah perusahaan dalam rangka *Tax Avoidance*. Jadi, semakin besar rasio Dewan Komisaris Independen maka akan semakin besar sebuah perusahaan melakukan manajemen laba dalam rangka *Tax Avoidance*. Jadi, semakin tinggi total Dewan Komisaris Independen maka semakin tinggi *Earnings Management* yang dilakukan entitas sehingga pembayaran pajak dapat diminimalkan, sehingga CETR akan semakin kecil. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa Good Corporate Governance mampu memperlemah pengaruh *Earnings Management* dalam rangka *Tax Avoidance*.

Pengaruh Earnings Management terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji regresi yang sudah dilakukan diperoleh hasil nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ yang berarti bahwa H4 diterima dengan koefisien negatif yang dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional mampu memperlemah pengaruh *Earnings Management* terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kepemilikan Institusional maka kecenderungan manajemen untuk melakukan manajemen laba dalam rangka *Tax Avoidance* semakin tinggi. Ketika suatu perusahaan memiliki kepemilikan organisasi, maka akan meningkatkan kinerja serta kepatuhan terhadap manajemen sebuah entitas. Semakin tinggi partisipasi Institusional, maka semakin tinggi hak suara lembaga tersebut dan semakin besar pula kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan. Kepemilikan institusional yang besar juga mengurangi masalah keagenan, meningkatkan peluang praktik penghindaran pajak perusahaan seperti mengurangi tindakan manajemen laba karena memudahkan institusi memantau kinerja operasional. Penelitian ini sama dengan yang terdahulu, yaitu penelitian Krisna (2019) dan Pratomo & Risa (2021). Namun tidak sejalan dengan penelitian dari Putri & Lawita (2019) karena penelitian tersebut mendapatkan hasil positif dan penelitian dari Amiludin (2022) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh pada *Earnings management* terhadap *Tax avoidance* dengan moderasi GCG.

Pengaruh Earnings Management terhadap Tax Avoidance dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji regresi yang sudah dilakukan diperoleh hasil nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Hal tersebut berarti H5 diterima dengan koefisien negatif yang dapat disimpulkan bahwa Komite Audit mampu memperlemah pengaruh *Earnings Management* terhadap *Tax Avoidance*. Berarti semakin tinggi Komite Audit maka semakin rendah *Earnings Management* yang dilakukan suatu perusahaan dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak. Komite Audit mempunyai wewenang untuk mencegah adanya aktivitas atau perilaku yang tidak lazim terkait dengan laporan keuangan Perseroan, termasuk aktivitas manajemen laba. Memiliki komite audit internal dapat meminimalkan manajemen laba dan menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Komite audit juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk mencegah terjadinya manajemen laba. Karena komite audit mengawasi seluruh aktivitas internal, suatu entitas yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan yang sebenar-benarnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan Ngabdillah *et. al.*, (2022). Akan tetapi tidak sesuai dengan penelitian Triyanti *et. al.*, (2020) dan Hapsari Ardianti (2019).

Pengaruh Financial Derivatif terhadap Tax Avoidance dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji regresi yang sudah dilakukan diperoleh hasil nilai signifikansi $0.115 > 0.05$ yang berarti bahwa H6 ditolak. Maka dari itu, Dewan Komisaris Independen tidak mampu memoderasi pengaruh *Financial Derivatif* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa berapapun jumlah proporsi anggota komisaris independen tidak mempengaruhi perusahaan untuk menggunakan *Financial Derivatif* dalam rangka tindakan *Tax Avoidance*. Tugas komisaris yang utama yaitu melakukan pengawasan secara preventif dan represif, sedangkan *Tax Avoidance* lebih ditekankan kepada manajemen perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang mengatakan bahwa agen akan berperilaku selfinterest (mementingkan dirinya sendiri) yang dikhawatirkan menjadi masalah keagenan jika kepentingan principal dan agent tidak sejalan dan principal kekurangan informasi untuk menilai perilaku agent secara tepat. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Ridiana (2021) yang mengatakan bahwa GCG tidak mampu memoderasi pengaruh Derivatif Keuangan terhadap *Tax Avoidance*. Namun tidak sesuai dengan penelitian Oktavia & Martani (2021).

Pengaruh Financial Derivatif terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji regresi yang sudah dilakukan diperoleh hasil nilai signifikansi $0.660 > 0.05$ yang berarti bahwa H7 ditolak. Maka dari itu, Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi pengaruh *Financial Derivatif* terhadap *Tax Avoidance*. Dapat diartikan bahwa besar kecilnya proporsi Kepemilikan Institusional tidak membuat transaksi dalam *Financial Derivatif* berpengaruh dalam hal penghindaran pajak. Institusi keuangan yang memiliki saham dalam sebuah perusahaan biasanya memiliki tujuan investasi jangka panjang yang berfokus pada pertumbuhan nilai perusahaan dan keuntungan jangka panjang. Strategi penghindaran pajak yang agresif seperti lindung nilai dalam transaksi derivatif dapat menimbulkan risiko reputasi yang tidak diinginkan dan mempengaruhi kepercayaan investor, yang mungkin bertentangan dengan tujuan jangka panjang mereka. Hasil ini sesuai dengan penelitian Pramita & Susanti (2023) namun tidak sesuai dengan penelitian oleh Chen (2022).

Pengaruh Financial Derivatif terhadap Tax Avoidance dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji regresi yang sudah dilakukan diperoleh hasil nilai signifikansi $0.165 > 0.05$ yang berarti bahwa H8 ditolak. Maka dari itu, Komite Audit tidak mampu memoderasi pengaruh *Financial Derivatif* terhadap penghindaran pajak. Total jumlah anggota komite audit yang bekerja untuk mengawasi penyusunan *Financial Statement* tidak serta merta membuat manajemen tidak akan melakukan aktivitas lindung nilai dengan menggunakan transaksi derivatif untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Sejalan dengan penelitian oleh Alhakim (2022) namun tidak sesuai dengan penelitian oleh Orlando *et. al.*, (2022).

5. Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu: *Earnings Management* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Jadi, semakin tinggi Manajemen Laba, semakin meningkat *Tax Avoidance* yang dilakukan entitas. Dampak positif *Earnings Management* terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan dengan fakta bahwa besar kecilnya laba menjadi acuan dalam menghitung besar kecilnya beban pajak suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan melaporkan labanya jika ingin mengurangi beban pajak yang dibayar.

Financial Derivatif tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti besar kecilnya transaksi derivatif yang terjadi, tidak akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Karena minimalnya komponen biaya yang bisa dikurangkan terkait dengan derivatif keuangan, sehingga sulit untuk mempengaruhi penghindaran pajak.

Dewan Komisaris Independen mampu memperkuat pengaruh *Earnings Management* terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi Dewan Komisaris, maka akan semakin besar tindakan *Earnings Management* yang dilakukan perusahaan dalam rangka *Tax Avoidance* dikarenakan jika *Earnings Management* semakin tinggi maka bonus yang akan didapatkan Dewan Komisaris juga akan semakin besar.

Kepemilikan Institusional mampu memperlemah pengaruh *Earnings Management* terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kepemilikan saham Institusi maka kecenderungan manajemen untuk melakukan *Earnings Management* dalam rangka *Tax Avoidance* semakin kecil. Dengan meningkatnya kepemilikan saham dari shareholders institusional dapat mengurangi masalah keagenan, sehingga akan berkurang juga peluang terjadinya tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan karena besarnya rasio Kepemilikan Institusional mampu meningkatkan pengawasan yang lebih optimal dalam suatu industri karena dianggap dapat mengawasi serta mengendalikan tiap keputusan serta kebijakan yang diambil oleh manajer sehingga diharapkan dapat memperkecil kesempatan untuk melaksanakan *Earnings Management* dalam praktik *Tax Avoidance*.

Komite Audit dapat memperlemah pengaruh *Earnings Management* terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Komite Audit maka kecenderungan manajemen untuk melakukan *Earnings Management* dalam rangka *Tax Avoidance* semakin rendah. Hal ini karena Komite Audit sebagai dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen yaitu tindakan Manajemen Laba dalam rangka *Tax Avoidance*.

Dewan Komisaris Independen tidak dapat memoderasi pengaruh *Financial Derivatif* terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan kurang efektif dalam fungsi melakukan pengawasan dan pengelolaan perusahaan sehingga keberadaan Komisaris Independen tidak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance*.

Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *Financial Derivatif* terhadap *Tax Avoidance*. Karena kepemilikan saham oleh institusi dalam suatu perusahaan tidak dapat menjamin perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan transaksi lindung nilai dalam hal ini *Financial Derivatif* untuk mengurangi pembayaran pajak (*Tax Avoidance*).

Komite Audit tidak dapat memoderasi pengaruh *Financial Derivatif* terhadap *Tax Avoidance*. Karena semakin banyak jumlah Komite Audit dalam suatu perusahaan tidak mampu mempengaruhi kebijakan manajemen untuk melakukan transaksi Derivatif sebagai tindakan *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan keefektifan Komite Audit dalam suatu perusahaan tidak cukup diwakili oleh jumlah anggota namun juga mengenai kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang memadai serta frekuensi aktivitas – aktivitas yang dilaksanakan oleh Komite Audit karena pengawasan yang dilakukan Komite Audit dalam suatu perusahaan tidak dapat menjamin pihak manajemen untuk tidak melakukan tindakan *Tax Avoidance* melalui Transaksi Derivatif. Dan kinerja Komite Audit yang dimiliki perusahaan belum tentu memberikan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan perusahaan berjalan secara optimal dan Komite Audit belum mampu berperan efektif dalam mengurangi terjadinya transaksi Derivatif dalam rangka *Tax Avoidance*.

Saran

Keterbatasan peneliti yaitu dalam penelitian Pengukuran derivatif keuangan menggunakan skala rasio sehingga total sample penelitian 15 perusahaan. Kecilnya nilai R-square pada penelitian ini. Saran untuk perusahaan adalah: Agar perusahaan dapat membuat regulasi perpajakan yang lebih baik sehingga terhindar dari praktik *Tax Avoidance* yang dapat merugikan citra perusahaan karena *Tax Avoidance* akan mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Sebab, perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance* akan mengurangi penghasilan negara sebagai tujuan untuk pembiayaan public facilityn kepada regulator adalah: Saran bagi pemerintah, agar lebih memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap entitas yang melaporkan pembayaran perpajakannya demi menghindari adanya upaya penghindaran pajak yang dapat merugikan negara Indonesia. Bagi fiskus diharapkan dapat memperkuat peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak memiliki celah untuk dimanfaatkan dalam melakukan *Tax Avoidance*. Agar penerimaan pajak negara dapat dimaksimalkan. Saran untuk peneliti selanjutnya: Untuk penelitian selanjutnya harap menggunakan skala dummy pada variabel Derivatif Keuangan yang mampu memperbanyak sample penelitian dengan 1 jika perusahaan menggunakan transaksi derivatif dan 0 jika tidak. Peneliti selanjutnya disarankan dapat mengubah pengukuran variabel Penggunaan Variabel Derivatif. Agar penelitian selanjutnya menambahkan variabel control untuk memperbaiki R-squarednya. (Contoh: Variabel Karakteristik Perusahaan). Agar penelitian selanjutnya menggunakan Dummy Variabel pada pengukuran Komite Audit agar data yang dihasilkan lebih maksimal.

Daftar Pustaka

- Agustina Putri, A., & Fathurrahmi Lawita, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.
- Alhakim, R. (2022). *Pengaruh Book Tax Gap, Transfer Pricing, Corporate Social Responsibility Dan Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi*.
- Amiludin, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Frima (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 10(3), 99–112. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.283>
- Chen, W. (2022). Are Financial Derivatives Tax Havens? Evidence From China. *International Journal Of Emerging Markets*, 17(8), 1949–1972. <https://doi.org/10.1108/Ijoem-06-2020-0655>
- Cobham, A., Garcia-Bernando, J., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020). The State Of Tax Justice 2020. *Tax Justice*. <https://doi.org/10.2307/J.Ct184qq11>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects Of Executives On Corporate Tax Avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/Accr.2010.85.4.1163>
- Firmansyah, A., Praptama, G. S., & Hasibuang, H. F. (2022). Peran Kebijakan Utang Dalam Hubungan Pengungkapan Keberlanjutan Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Stei Ekonomi*, 31(01), 65–75. <https://doi.org/10.36406/Jemi.V31i01.607>
- Hapsari Ardianti, P. N. (2019). Profitabilitas, Leverage, Dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2019), 2020. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P13>
- Krisna, A. M. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pada Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Marfiana, A., & Putra, Y. P. M. (2021). The Effect Of Employee Benefit Liabilities, Sales Growth, Capital Intensity, And Earning Management On Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Stie Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.35906/Jm001.V7i1.718>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/Jmat.V7i2.7731>
- Ngabdillah, Fahmi Rochmat, Pratama, B., & Dirgantari, N. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen*, 16(1), 1–16.
- Nurfitriasih, D. M., & Istiqomah, D. F. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal Of Applied Accounting And Taxation*, 7(2), 70–80. <https://doi.org/10.30871/Jaat.V7i2.4495>
- Oktavia, O., & Martani, D. (2021). Tingkat Pengungkapan Dan Penggunaan Derivatif Keuangan Dalam Aktivitas Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 129–146. <https://doi.org/10.21002/Jaki.2013.07>
- Orlando, S., & Al., E. (2022). *Pengaruh Instrumen Derivatif Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak*. 9(2), 189–212.
- Pramita, Y. D., & Susanti, E. N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.59330/Jai.V1i2.11>
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/Jak.V8i1.2487>
- Ramadhan, H. A., Ratnawati, V., & Fitrioso, R. (2021). The Effect Of Related Party Transaction And Earnings Management On Tax Avoidance With Good Corporate Governance Moderate Variables. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 358–369.
- Ridiana. (2021). *Analisis Pengaruh Penggunaan Derivatif Keuangan terhadap Praktik Penghindaran Pajak*. 12(1), 6.
- Septianingsih, A. (2022). Pemodelan Data Panel Menggunakan Random Effect Model Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Umur Harapan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Lebesgue : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Statistika*, 3(3), 525–536. <https://doi.org/10.46306/Lb.V3i3.163>
- Sundari, E., & Nofryanti. (2019). Pengaruh Derivatif Keuangan Dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 16(02), 142–150. <https://doi.org/10.25134/Equi.V16i02.2179>
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit,

Komisaris Independen Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V20i1.850>